

Peranan Mohammad Hatta pada Masa Pemerintahan Parleментар 1948-1956

Kasirun^{1*}, Iskandar Syah² dan Wakidi³

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung
E-mail: kasirun035@ymail.com. HP. 0896-1262-4808

Accepted: March 27, 2018 Received: April 2, 2018 Online Publish: April 3, 2018

Abstract: *The Role of Government Mohammad Hatta Parliamentary During 1948-1956. This study aims to find out what role sisitem Mohammad Hatta during 1948-1956 Parliamentary government. The method used in this research is the methode of data collection using techniques historis. The data collecting were done by using literature technique and documantation technique, and the data analysis were done by using analysis and qualitative. Based on the research role during the reign of Mohammad Hatta Mohammad Hatta 1948-1956 parliamentary became Prime Minister, chairmandelegation of the Round Table Conference (RTC) and The originator of the Indonesian People's Economy.*

Keywords: *mohammad hatta, parliamentary, leader*

Abstrak: **Peranan Mohammad Hatta pada Masa Pemerintahan Parleментар 1948-1956.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peranan Mohammad Hatta pada masa sisitem pemerintahan parleментар 1948-1956. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan dokumentasi, untuk menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian peranan Mohammad Hatta pada masa pemerintahan parleментар 1948-1956 yaitu Mohammad Hatta menjadi perdana menteri, ketua delegasi Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Penggagas Ekonomi Kerakyatan bagi Indonesia.

Kata Kunci: mohammad hatta, parleментар, pemimpin

PENDAHULUAN

Sistem politik yang dilaksanakan pada tahun 1948-1956 ialah menggunakan demokrasi, khususnya demokrasi parlementer. Partai politik dipandang sebagai lembaga masyarakat yang terpenting bagi partisipasi rakyat dalam kehidupan nasional. Kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (Albert Widjaja : 1982, 87). Dalam sistem demokrasi parlementer, kabinet dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden tetap kepala negara, tetapi bukan kepala pemerintahan, suara para anggota DPR biasanya keras sehingga pernah menimbulkan reaksi dikalangan angkatan bersenjata. Para anggota DPR hanyalah mencari kedudukan khususnya sebelum Pemilihan Umum 1955 (Tashadi, 1999:59).

Kabinet dalam masa pra pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 tidak bisa bertahan lama hanya selama 7 bulan, dan hal tersebut menghambat perkembangan politik maupun ekonomi, oleh karena itu pemerintah tidak bisa memaksimalkan kinerja program-programnya. Kemudian pada pemilihan umum tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan, bahkan tidak bisa dipungkiri menimbulkan perpecahan antara pemerintah pusat dan diberbagai daerah.

Mohammad Hatta adalah salah satu tokoh besar Indonesia yang memiliki peran besar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Selain itu pemikiran Mohammad Hatta bukan hanya mencapai kemerdekaan, tetapi juga tentang bagaimana mempersiapkan Indonesia, untuk memperjuangkan, menerima dan mengisi kemerdekaan itu sebaik-

baiknya (Alfian, 1983: 144). Untuk periode demokrasi parlementer, kepemimpinan nasionalisme masih tetap dilakukan oleh dwi tunggal Soekarno-Hatta (Deliar Noer, 1988:289). Mohammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai wakil presiden, Mohammad Hatta menunjukkan peran besar dalam pengambilan keputusan dengan mengeluarkan beberapa produk hukum.

Tonggak politik Mohammad Hatta adalah perannya dalam mengubah demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlementer. Mohammad Hatta mendukung pergantian itu. Maklumat Wakil Presiden No. X menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan eksekutif, yang sehari-hari dilakukan oleh padan pekerja KNIP. Penjelasan terhadap maklumat tersebut yang dikeluarkan pada 20 Oktober 1945 benar-benar mengusung konsep parlementarian. Dalam arti kata, maklumat ini menjadi landasan baru terbentuknya *check and balance* kekuasaan (Salman Alfarizi, 2009: 170).

Mohammad Hatta adalah pendukung negara serikat dan cita-citanya membangun demokrasi parlementer bagi Indonesia. Oleh karena itu, Mohammad Hatta menyetujui usulan dari Badan Pekerja KNIP tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial ke parlementer yang diketuai Sjahrir dengan alasan UUD 1945 tidak memuat pasal yang mewajibkan atau melarang pertanggungjawaban di tingkat menteri, dan bahwa pertanggungjawaban ke KNI (MPR)

merupakan salah satu cara menegakkan kedaulatan rakyat (Salman Alfarizi, 2009: 104). Selain Maklumat No. X, Mohammad Hatta juga mengeluarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang anjuran kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik. Maklumat tersebut bukan saja memberikan pengakuan terhadap arti penting partai politik, tetapi juga menempatkan pemerintah dalam posisi pro aktif ke arah pembentukan partai-partai politik.

Landasan pemikiran yang diajukan Mohammad Hatta demi menegaskan arti penting kehadiran partai adalah bahwa partai politik merupakan institusi politik memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan rakyat (Salman Alfarizi, 2009: 170). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja peranan Mohammad Hatta pada masa sistem pemerintahan parlementer 1948-1956.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis. Metode historis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu” (Louis Gottschalk, 1986 : 32). Metode penelitian historis adalah suatu usaha untuk memberikan interpretasi dari bagian trend yang naik turun dari suatu status keadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan dengan keadaan sekarang dan dapat meramalkan keadaan yang akan datang (Mohammad Nazir, 1988 : 56). Adapun langkah-langkah yang

dilakukan dalam penelitian historis adalah sebagai berikut:

1. *Heuristik*, pada kegiatan ini peneliti mencoba mengumpulkan data dan mencari sumber-sumber penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Sumber-sumber data yang diperoleh untuk menjelaskan konsep, materi dan metodologi penelitian dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Majalah : Tempo.
 - b. Jurnal: Maryono. *Bung Hatta, Proklamator, Ilmuwan, penulis dan Karya-karyanya : Sebuah Analisis Bio-Bibliometrik*. 2015.
 - c. Buku-buku sejarah: contohnya seperti buku *Kumpulan Pidato I dari Tahun 1942-1956* Karya Mohammad Hatta. Buku *Kumpulan Pidato II dari Tahun 1951-1979* karya I Wangsa Widjaja. Buku *Bung Hatta Berpidato Bung Hatta Menulis* karya Mohammad Hatta.
 - d. Buku-buku pendukung penelitian : contohnya seperti *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* karya Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Sejarah* karya Daliman, *Mengerti Sejarah* karya Louis Gottschalk.
3. Kritik, setelah data berhasil terkumpul selanjutnya peneliti melakukan kritik terhadap sumber yang ditemukan, dengan melakukan kritik ekstern maupun intern.
4. Interpretasi, setelah melakukan kritik terhadap sumber yang didapat langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi atau melakukan penafsiran terhadap sumber atau data yang

telah valid untuk kemudian membentuk konsep dan generalisasi sejarah. Peneliti mencoba menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan informasi yang didapat dari sumber yang telah dipilih tentang peranan Mohammad Hatta pada masa sistem pemerintahan parlementer 1948-1956.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitiannya. Pada penelitian kali ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teknik Kepustakaan

Teknik kepastakaan adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah (Joko Subagyo, 2006 : 109).

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1989 : 206).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data *historis*, yaitu menggunakan kritik dan interpretasi serta menarik dan menafsirkan kesimpulan dengan menggunakan tahap historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mengenai peranan Mohammad Hatta di dalam sistem

pemerintahan parlementer 1948-1956.

1. Gambaran umum pemerintahan parlementer pasca kemerdekaan

Berdasarkan maklumat Nomor X, tanggal 16 Oktober 1945 yang mencakup dua hal yang pertama, izin pembentukan partai-partai. Kedua, yang menjadi tujuan dari maklumat wakil presiden itu adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai pengganti MPR. Tujuannya adalah "*division of power*" sehingga DPR dan MPR tidak lagi dirangkap Presiden. Kemudian, mulai tanggal 1 November 1945, kabinet bertanggung jawab kepada Badan Pekeja KNIP sehingga dalam praktiknya yang terjadi adalah sistem parlementer dimana BP KNIP berperan sebagai Parlemen (Burhan D. Magenda dalam Gloria Juris vol.7.2007:119).

Pemerintahan parlementer pasca merdeka, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program pembangunan dari pemerintah tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkeseimbangan. Salah satu penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis, Sutan Sjahrir dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda. Ini adalah strategi yang sengaja dimunculkan oleh tokoh-tokoh pada saat itu agar kemerdekaan Indonesia segera mendapat pengakuan dari negara-

negara barat. Sejak mulai berlangsungnya sistem parlementarisme dalam konteks UUD 1945, sistem yang menimbulkan instabilitas pasca peralihan karena nasib kabinet ditentukan oleh BP KNIP dan bukan oleh presiden presiden hanyalah menjadi kepala negara dan bukan kepala eksekutif, yang justru dijabat oleh perdana menteri.

2. Biografi Singkat Mohammad Hatta

2.1 Keluarga

Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi, pada tanggal 12 Agustus 1902. Nama yang diberikan oleh orang tuanya ketika dilahirkan adalah Muhammad Athar. Sayang sekali sang ayah hanya bisa mendampingi Hatta kecil hingga berusia 8 bulan. (Mohammad Hatta, 1976: xvii). Mohammad Hatta adalah putra dari Datuk Syeikh Abdurrahman, ulama besar di surau Batu Hampar dan ayahnya Muhammad Djamil, tidak melanjutkan kehidupan ulama, Seperti pamannya melainkan berdagang, namun tentu tidak lepas dari pengaruh agama, baik ibadah maupun prilakunya.

Istrinya Rahmi Rahim berasal dari keturunan Aceh dan Sunda, dari hasil pernikahan nya dengan Rahmi Rahim Mohammad Hatta mempunyai tiga orang anak perempuan, yakni Meutia Farida (dokter dalam antropologi dan dosen di Universitas Indonesia. Gemala (dokter dalam administrasi kesehatan) dan Halida (lulusan FISIP Universitas Indonesia).

2.2 Pendidikan

Pada tahun 1913-1916 beliau melanjutkan *Europeesche Lagere School* (ELS) di Padang, Mohammad

Hatta studi ke MULO di Padang saat usia 13 tahun, sebenarnya Hatta masuk ke HBS (setingkat SMA) di Batavia (kini Jakarta), baru kemudian pada tahun 1919 Mohammad Hatta pergi ke Batavia dan memasuki sekolah dagang *Prins Hendrik* (*Prins Hendrik Handle School*, atau disingkat *PHS*). Mohammad Hatta menyelesaikan studinya dengan hasil sangat baik. Tahun 1921, Mohammad Hatta pergi ke *Rotterdam* Belanda, untuk belajar ilmu perdagangan/bisnis di *Nederland Handelshogeschool*. Kemudian Mohammad Hatta tinggal selama 11 tahun di Belanda. Pada tanggal 27 November 1956, Mohammad Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis *Honoris Causa* dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.

2.3 Organisasi

Kemampuan berorganisasi Mohammad Hatta sudah terlihat dalam diri Mohammad Hatta sejak awal masa pendidikan, hal itu dibuktikannya saat menjadi bendaharawan *Jong Sumatranen Bond*. Di Belanda, Mohammad Hatta menjadi anggota PI atau Perhimpunan Indonesia, beberapa tahun di sana Mohammad Hatta dipercaya oleh para anggotanya untuk menjadi ketua. Selain itu Mohammad Hatta menghadiri Kongres Internasional Menentang Kolonialisme di Brussel, Belgia. Salah satu hasil kongresnya yaitu terbentuknya” Liga Anti Imperialisme dan Penindasan Kolonial dan Demi Kemerdekaan Indonesia. *He left the Anti-Imperialis league because communists dominated it.* (Dia meninggalkan Liga Anti-Imperialis karena

Komunis mendominasinya) (Majalah Tempo, 2001 : 59). Di Indonesia, Mohammad Hatta masuk ke PNI yaitu Partai Nasional Indonesia. Di PNI Baru, Hatta menerapkan prinsipnya yang pada PNI pimpinan Soekarno tidak diterapkan, karena, partai berfungsi selain sebagai alat politik, juga sebagai pendidikan ekonomi politik kepada masyarakat. Ini terbukti pada saat pimpinan PNI baru ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda, langsung ada ketua-ketua baru yang cepat menggantikan. Oleh karena itu, regenerasi pemimpin itu baru berhenti sampai partai itu resmi dibubarkan oleh pemerintah kolonial. (Mohammad Hatta, 1976: xxiv).

3. Peranan Mohammad Hatta pada masa Pemerintahan Parleментар 1948-1956

3.1 Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri

Pada tanggal 17 Desember 1949, bertempat di bangsal Sithinggil Keraton Yogyakarta, ketika presiden Ir. Soekarno dilantik sebagai presiden Republik Indonesia Serikat. Mohammad Hatta, wakil presiden, juga diangkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Sejak masa pergerakan, Mohammad Hatta dikenal sebagai pemimpin yang lebih menyukai negara federasi ketimbang negara kesatuan. Fase ini adalah kesempatan Mohammad Hatta untuk mewujudkan gagasan-gagasan tentang negara federasi untuk Indonesia. Mohammad Hatta kemudian membentuk kabinet. Kabinet yang dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. Kedudukan Mohammad Hatta sebagai perdana menteri dalam memang lebih kuat daripada Soekarno sebagai presiden

mengingat sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Kekuatan Mohammad Hatta ini selain secara konstitusional juga sebagian berasal dari pengaruhnya di tentara. Selain itu, Mohammad Hatta juga memperoleh dukungan dari barat, termasuk Belanda dan Amerika, karena peranannya sebagai seorang pemimpin yang menghendaki jalan perundingan (Wawan Tunggul Alam, 2003: 250-251).

1. Kabinet Hatta I

Mohammad Hatta sebagai wakil presiden kemudian ditunjuk oleh presiden sebagai perdana menteri menggantikan Amir Sjahrifuddin yang telah jatuh pada tanggal 29 Januari 1948 terbentuklah Kabinet baru yaitu Kabinet Hatta. Hari pertama Mohammad Hatta menjabat sebagai ketua kabinet sudah dihadapkan dengan masalah yang sulit yaitu akibat dari perjanjian Renville. Kabinet Hatta I mempunyai program antara lain:

1. Kabinet akan menyerahkan Renville dan berunding terus atas dasar yang telah tercapai.
2. Melaksanakan terbentuknya NIS (Negara Indonesia Serikat).
3. Mengadakan rasionalisasi.
4. Melancarkan pembangunan (I Wangsa Widjaja, 1981 : 154).

Dalam melakukan usaha-usaha rasionalisasi ini, Mohammad Hatta memperoleh dukungan dari Nasution, untuk menjadi Panglima Divisi Siliwangi. Mohammad Hatta pernah bekerja sama dengan Nasution, sewaktu Mohammad Hatta menduduki jabatan sebagai menteri pertahanan dan perdana menteri (Mavis Rose, 1991: 246). Program Kabinet Hatta ini akan menyerahkan Renville dan akan berunding secara

terus menerus merupakan salah satu usaha dari Mohammad Hatta untuk menyikapi perundingan Renville karena semenjak Mohammad Hatta diangkat menjadi perdana menteri perundingan Renville sudah dilaksanakan, dan harus diselesaikan sehingga mendapatkan kondisi yang lebih baik.

Program kedua yaitu untuk membentuk NIS (Negara Indonesia Serikat) Mohammad Hatta meminta Menteri Kehakiman NIS Soumakil dan beberapa anggotanya seperti Batianas, Manoutu, A. J Nieuwenhhus untuk membentuk Undang-Undang Dasar NIS (I Wangsa Widjaja, 1981: 57). Program Kabinet Hatta ketiga yaitu rasionalisasi, dengan tentara dan pegawai negeri berdasarkan pertimbangan kurangnya sumber daya negara. Tujuan rasionalisasi adalah penyempurnaan dan pembangunan yang meringankan beban masyarakat beserta pengurangan penderitaan rakyat. (I Wangsa Widjaja, 1981: 205).

a. Perlawanan FDR dan PKI

Program Mohammad Hatta banyak yang menentang, salah satu tokoh yang menentang Mohammad Hatta adalah Amir Sjarifuddin yang semula diajak di dalam Kabinet Hatta, tetapi kemudian Mohammad Hatta membatalkan karena Amir meminta jatah kursi yang lebih untuk FDR nya. Amir Sjarifuddin juga mencopot Jenderal Sudirman dan Letnan Jendral Urip, dan mengangkat Surjadarma, kepala staf angkatan udara, menjadi kepala staf angkatan bersenjata. Begitu Kabinet Hatta terbentuk kedudukan Amir Sjarifuddin dan Jenderal Sudirman dan Letnan Jendral Urip dikembalikan oleh pemerintah.

Tanggal 29 Januari 1948 Hatta mengumumkan anggota kabinetnya. Tak ada seorang pun orang komunis menjadi menteri. Amir Sjarifuddin kecewa. Lalu ia mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Dalam FDR itu bergabung semua organisasi yang berhaluan Komunis. Mereka semua menuntut supaya Kabinet Hatta dibubarkan. Mereka menuntut pula supaya Perjanjian Renville dibatalkan (Amrin Imran, 1981 : 76). Sebagai bentuk serangan Amir Sjarifuddin terhadap Kabinet Hatta ini adalah dengan mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 26 Februari 1948 yang merupakan kelompok anti segala pemerintahan Mohammad Hatta.

Program FDR sama dengan program Tan Malaka yang menghendaki penasionalisasi barang milik asing, pengerahan massa untuk menyelesaikan masalah dan penghentian perundingan dengan Belanda. *When Hatta returned to Indonesia he brought with him a series of criticisms against communism, and firmly responded to Tan Malaka's attacks against the Duumvirate* (Ketika Hatta kembali ke Indonesia dan dia membawa kepadanya serangkaian kritiknya ke komunis lagi dan dia dengan tegas menanggapi serangan Tan Malaka. (Tempo 2001 : 59).

Program dari FDR ini jelas sekali ditentang oleh Mohammad Hatta karena itu bertentangan dengan Manifesto Politik 3 November 1945, FDR melakukan teror kepada rakyat untuk menjatuhkan Kabinet Hatta di mata masyarakat. FDR yang tergabung dalam pemberontakan PKI merupakan gabungan dari para partai sosialis, bekas anggota yang tergabung dalam pemerintahan Amir Sjarifuddin, Partai Buruh,

Pesindo, dan SOBSI. Pemberontakan yang dilakukan PKI dan FDR di Madiun dapat ditumpas dengan cepat dengan menjadikan Jawa Timur sebagai daerah istimewa dan Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer karena Jenderal Sudirman sedang sakit dan pimpinan operasi diserahkan pada Kolonel AH Nasution dan dengan dua brigade kesatuan cadangan umum Divisi IV Siliwangi dan Brigade Surachman dari Jawa Timur (*Kahin Mc Turnan George*, 1993: 355-378).

b. Agresi militer Belanda II

Pasca penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, kemudian Kabinet Hatta mendapat hambatan kembali dengan adanya agresi militer Belanda II. Mohamad Hatta dibuang ke Bangka bersama beberapa tokoh Indonesia lain. Mohammad Hatta mengadakan rapat kabinet darurat dengan mengambil dua keputusan yaitu : Bahwa Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri yang bersidang akan berada di Yogyakarta dan tidak meninggalkan Yogyakarta walau harus menghadapi resiko penangkapan oleh Belanda. Bahwa Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawiranegara yang sedang di Sumatera diberi mandat untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera dan bila tidak berhasil memberi kuasa kepada Sudarsono (wakil RI yang berada di New Dehli, L.N Palar yang berada di New Dehli untuk membentuk *exile government* (Pemerintah Pelarian) RI di India. (Deliar Noer, 1990:339).

Pada tanggal 22 Desember 1948 bersama Soekarno, Haji Agus Salim, Sjahrir, Assat, Ghafar Pringgodigdo, Komodor Udara

Suryadharma, Mohammad Roem dan Ali Sastroamidjoyo ditahan di Bangka dan pada tanggal 22 Desember 1948 PDRI di proklamirkan.

Adanya Agresi Militer Belanda II hingga penangkapan pemimpin RI mendapat reaksi keras dari dunia internasional terutama dari Amerika Serikat dan beberapa negara luar yang tergabung dalam Konferensi Asia yang meminta PBB untuk bersikap tegas dengan tindakan Belanda tersebut. Kemudian PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 28 Januari 1949 yang berisi penghentian senjata, pembebasan pemimpin RI dan mengembalikan Yogyakarta kepangkuan RI dan segera diadakan perundingan lagi untuk membahas kedaulatan negara. Resolusi PBB membuat posisi Belanda semakin terdesak dan menyetujui resolusi tersebut. Perundingan Belanda-Indonesia terealisasi dengan adanya perundingan Roem Royen pada tanggal 7 Mei 1949.

2. Kabinet Hatta II

Setelah kota Yogyakarta kembali ke pangkuan RI dan Syafruddin Prawiranegara mengembalikan pemerintahan kepada presiden maka dimulailah babak baru untuk memilih perdana menteri baru. Setelah penandatanganan Undang-Undang Dasar Sementara, Presiden Soekarno dihadapkan pada satu masalah untuk menentukan pemegang tampuk pemerintahan karena ada beberapa pilihan yang dianggap pantas semua, yaitu Anak Agung Gede Agung, Sultan Hamengku Buwono dan Mohammad Hatta, karena Presiden Soekarno lebih menggunakan hati untuk penentuan ini maka

pemerintahan diserahkan kepada Mohammad Hatta. Kabinet Hatta II dibentuk pada tanggal 4 Agustus 1949 yang di ketuai oleh Mohammad Hatta yang sekaligus menjabat sebagai perdana menteri. Program kabinet ini tidak diumumkan, namun usaha-usaha dan kebijaksanaan pemerintah digerakan dan dijalankan sesuai dengan kepentingan negara menurut situasi dan kondisi waktu itu.

a. Konferensi Antar Indonesia

Dalam rangka menghadapi KMB akan diadakan Konferensi Antar Indonesia yang dimulai di Yogyakarta tanggal 28 Juli dan ditutup di Jakarta tanggal 2 Agustus 1949. Hasil dari Konferensi Antar Indonesia ini adalah :

1. Mengubah NIS menjadi RIS
2. Mengesahkan bendera merah putih sebagai bendera negara
3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara
4. Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan
5. Tanggal 17 Agustus sebagai hari nasional (Mohammad Hatta, 1978 : 350-355).

Tanggal 2 November 1949 KMB secara resmi ditutup. Dan Seluruh Indonesia diserahkan oleh Belanda RIS kecuali Irian Barat. Maka status Keresidenan Irian (Nieu Guinea) tetap berlaku, seraya di tentukan bahwa dalam setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan ketatanegaraan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda (Bibit Suprpto, 1985 : 100-101). Kabinet ini berhasil meraih pemulihan kedaulatan atas wilayah

negara Indonesia dari tangan Belanda. Tanggal 19 Desember 1949 RI berubah menjadi RIS.

Pemerintah RIS ini mengusahakan (dengan beberapa perubahan kalimat/bahasa) :

- a. Penyerahan kekuasaan di seluruh negeri ke tangan Indonesia, reorganisasi tentara KNIL dan pembentukan tentara Belanda ke negerinya selekas-lekasnya.
- b. Penyelenggaraan ketentraman umum, penjaminan hak-hak demokrasi, dan pelaksanaan dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaannya.
- c. Peletakkan dasar hukum, cara rakyat menyatakan kemauannya dan pemilihan umum untuk konstituante.
- d. Perbaikan keadaan ekonomi rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perubahan dan kesehatan serta jaminan sosial dan penempatan tenaga kembali ke masyarakat, peraturan upah minimum, pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar terwujud kemakuran seluruhnya.
- e. Penyempurnaan perguruan tinggi sesuai keperluan masyarakat, pembangunan pembangunan pemberdayaan nasional, penggiatan pemberantasan buta huruf.
- f. Penyelesaian soal Irian Barat dalam setahun dengan jalan damai.
- g. Penyelenggaraan politik luar negeri yang memperkuat kedudukan RIS dalam dunia Internasional dengan memperkuat cita-cita perdamaian dunia dan persaudaran bangsa-bangsa (Deliar Noer 1990 : 94).

Maka Kabinet Hatta II otomatis demissioner dan bukan

berarti karena terjadi keretakan dalam tubuh kabinet, atau oposisi dari partai oposisi sehingga menimbulkan *mosi* tidak percaya tetapi karena adanya perubahan struktur pemerintahan yang menghendaki reformasi kabinet.

3. Kabinet Hatta III

Pada masa pemerintahan Kabinet Hatta III ini pemerintahan Indonesia bisa dikatakan lebih baik dan bisa membawa perubahan besar pada sistem pemerintahan Indonesia. Dimasa pemerintahannya yang ketiga kalinya ini, Mohammad Hatta harus mengatasi beberapa masalah. Dua persoalan internasional yang harus dihadapi ialah bagaimana mengendalikan arus tengah antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan bagaimana membujuk Belanda supaya melepaskan Irian Barat.

Sementara status Uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda merupakan masalah tersendiri yang masih menjadi beban dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mohammad Hatta, 1978:561). Mohammad Hatta harus menentukan posisi Indonesia di dunia internasional yang terbagi ke dalam dua blok. Mohammad Hatta menyarankan dengan gerakan non blok melalui ke kebijakan luar negeri bebas aktif.

Keberhasilan Kabinet Hatta membawa 3 tokoh yang semula dicalonkan oleh Presiden Soekarno sebagai perdana menteri setelah PDRI menyerahkan pemerintahan ke Yogyakarta, menjadi pemegang pemerintahan setelah penyerahan kedaulatan hingga terbentuk NKRI tahun 1950 dan kabinet ini disebut dengan Kabinet Hatta III, karena sebagai perdana menterinya tetap Mohammad Hatta yang dibantu oleh

menteri-menteri yang tersusun dalam susunan Kabinet Hatta III (Mohammad Hatta, 1978 : 560).

3.2 Mohammad Hatta Ketua Delegasi KMB

Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia perjuangan Mohammad Hatta dilakukan melalui cara diplomasi. Mohammad Hatta mengadakan diplomasi dengan pihak penjajah maupun negara-negara lain di dunia. Tanggal 23 Agustus 1948 Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Haag Belanda resmi dibuka. Konferensi Meja Bundar merupakan perundingan antara Indonesia, delegasi BFO, UNCI (dari PBB) dan Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta, wakil ketua Mohammad Roem dan Soepomo, sekretaris dipegang oleh Abdoel Karim Pringgodigdo.

Masalah yang paling hangat dibicarakan di KMB adalah masalah keuangan, Belanda mendesak supaya Indonesia menerima untuk membayar hutang luar negeri Belanda sejumlah f. 3.167 juta dan hutang dalam negeri sebesar f. 2956 juta. Mohammad Hatta tentu saja marah dan tidak mau menerima tuntutan Belanda, akan tetapi atas desakan *Cochern* sebagai wakil PBB Mohammad Hatta dengan berat hati menerima tuntutan tersebut dengan pengurangan sampai f. 2000 juta pada angka awal Belanda.

Sambil mengingatkan bahwa kehilangan kedaulatan bukan hanya akan menyebabkan permusuhan baru, akan tetapi juga berarti kehilangan simpati Amerika Serikat (Mavis Rose, 1991: 275-276). Sidang ditutup tanggal 2 November 1949 dan hanya dengan bentuk federal Belanda mau menyerahkan dan

mengakui kedaulatan dan kemerdekaan negara Indonesia. Tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag dilakukan upacara penandatanganan naskah pengakuan atau penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat diwakili dan ditandatangani oleh Mohammad Hatta, sedangkan Belanda diwakili oleh Ratu Yuliana. Secara politik, Indonesia telah terbebas dan Mohammad Hatta memimpin perundingan terakhir untuk memperoleh kemerdekaan itu. (Mavis Rose, 1991: 280).

3.3 Penggagas Ekonomi Kerakyatan

Sosok Mohammad Hatta terlihat pula pada tindakannya di dalam bidang ekonomi, yang dianggap sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia. Saat depresi besar ditandai oleh menurunnya tingkat ekonomi dunia serta krisis ekonomi yang terjadi secara dramatis sejak tahun 1929 dan secara umum dapat dikatakan berakhir setelah Perang Dunia II. Mohammad Hatta tidak hanya berpandangan jika krisis ekonomi yang terjadi pada masa kapitalisme merupakan masalah di level praksis, melainkan juga masalah paradigmatik yang jelas menunjukkan adanya krisis di tubuh itu sendiri (Fadli Zon : 16).

Bagi Mohammad Hatta krisis ekonomi yang sedang terjadi itu merupakan panggilan untuk memikirkan alternatif pemikiran jalan ekonomi yang lebih membumi untuk bangsanya. Gagasan ekonomi kerakyatan yang dicanangkan Mohammad Hatta adalah mengenai politik perekonomian. *Hatta idealistics mind, power shared widely was the closest to his ideas of democracy* (pemikiran idealisme

Hatta adalah kekuatan yang dimiliki secara luas adalah yang paling dekat dengan gagasan demokrasi (Tempo, 2001 : 59).

The Foundation of the nation's economy as outlined in the 1945 Constitutions. (Fondasi ekonomi kerakyatan yang sebagaimana digariskan dalam UUD 1945) (Tempo, 2001 : 59). Atas asas-asas kekeluargaan itu dicanangkan Mohammad Hatta dalam bentuk koperasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan tentang peranan Mohammad Hatta di dalam masa sistem pemerintahan parlementer 1948-1956 dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Mohammad Hatta sebagai perdana menteri, Mohammad Hatta dikenal sebagai pemimpin yang lebih menyukai kebijakan diplomasi, sebagai perdana menteri Mohammad Hatta mewujudkan melalui kebijakannya pada Kabinet Hatta I, Kabinet Hatta II dan Kabinet Hatta III.

Mohammad Hatta ketua delegasi Konferensi Meja Bundar (KMB), sebagai ketua delegasi Mohammad Hatta berperan dalam pengakuan kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain atas Belanda diantaranya dengan menandatangani dokumen resmi hasil Konferensi Meja Bundar oleh Mohammad Hatta dan Belanda diwakili oleh Ratu Yuliana.

Penggagas ekonomi kerakyatan, dalam gagasan ekonominya tentang gagasan ekonomi kerakyatan yang dicanangkan Mohammad Hatta adalah mengenai politik perekonomian dalam demokrasi

sosial. Mohammad Hatta menganggap ekonomi adalah sebuah ilmu yang memberikan penjelasan tentang manusia yang harus ditempuh dalam usaha untuk mencapai kemakmuran yang diimplementasikan nya kedalam bentuk koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian. 1983. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Alfarizi, Salman. 2009. *Mohammad Hatta Biografi Singkat*. Jogjakarta : Garasi.

Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bibit, Soeprapto. 1985. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Deliar Noer. 1988. *Mohammad Hatta : Hati Nurani Bangsa*. Jakarta Djambatan.

_____.1990. *Mohammad Hatta : Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.

Gosttschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

Imran, Amran. 1981. *Pejuang, Proklamator, Pemimpin, Manusia Biasa*. Jakarta : Mutiara.

I Wangsa Widjaja 1981. *Mohammad Hatta : Kumpulan Pidato I*

dari Tahun 1942-1956. Jakarta: Yayasan Idayu.

Kahin Mc Turnan George. 1993. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Yogyakarta : Komunitas Bambu.

Mavis Rose. 1991. *Biografi Politik Mohammad Hatta*. Jakarta : Gramedia.

Mohammad Hatta. 1978. *Mohammad Hatta Kumpulan Pidato II dari Tahun 1951-1979*. Jakarta: Yayasan Idayu.

_____. 1976. *Mohammad Hatta : Kumpulan Karangan Jilid 1 / Mohammad Hatta* Jakarta: Bulan Bintang.

Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta. PT. Ghalia Indonesia.

Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.

Tashadi. 1999. *Tokoh-tokoh Pemikir Kebangsaan*. Jakarta : CV. Ilham Bangun Karya.

Tempo. 20 Agustus 2001. *Hattanomics*. Jakarta.

Wawan Tunggu Alam. 2003. *Bung Karno Menggali Pancasila*. Jakarta Gramedia.

Widjaja. Albert. 1982. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.

Zon Fadli. 2008. *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta : Fadli Zon library.